

EVALUASI STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA HALAL DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT (STUDI PADA DINAS PARIWISATA)

Zainul Rahman¹, Gaston Otto Malindir²

^{1,2} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjajaran, Jl. Bukit Dago Utara no.25, Kota Bandung, Jawa Barat 40135

E-mail: Zainulrahman720@gmail.com; otto.malindir@gmail.com

ABSTRAK. Permasalahan di lapangan menunjukkan bahwa upaya pengembangan pasar wisata halal terus di masifkan di Indonesia, akan tetapi pada dasarnya belum dicanangkan standar baku terkait pengaturan konsep halal untuk berbagai destinasi wisata yang ada, baik restoran, sauna, spa, penginapan, maskapai penerbangan, biro perjalanan atau yang lainnya. Di sisi lain, hadir rasa skeptis masyarakat terkait konsep wisata halal yang dinilai tidak dapat menjamin kaum marginal serta berkenaan dengan alat politik identitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi pengembangan pariwisata halal di Provinsi Nusa Tenggara Barat dijalankan. Adapun penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni studi pustaka dan studi lapangan yang meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses implementasi kebijakan wisata halal di Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdapat beberapa kendala yang berimplikasi pada kurang maksimalnya penerapan kebijakan tersebut. Adapun beberapa kendala tersebut ialah sebagai berikut: 1) Polemik kebijakan wisata halal di tatanan masyarakat, 2) berkurangnya kegiatan sosialisasi dan *branding*, terakhir 3) bencana alam dan pandemi Covid-19. Berdasarkan kajian yang ditempuh dalam evaluasi program wisata halal Nusa Tenggara Barat, maka dapat disimpulkan bahwa program yang dicanangkan tersebut belum mampu untuk secara penuh mencapai target atau visi awal. Oleh sebab itu, diperlukan adanya inovasi dan evaluasi untuk memperbaiki beberapa kelemahan dalam implementasi program pariwisata halal Nusa Tenggara Barat kedepannya.

Kata kunci; Evaluasi, Strategi Pengembangan, Pariwisata Halal.

EVALUATION OF HALAL TOURISM DEVELOPMENT STRATEGY IN WEST NUSA TENGGARA PROVINCE (STUDY AT TOURISM DEPARTMENT)

ABSTRACT. The problems in the field show that efforts to develop the halal tourism market continue to be massive in Indonesia, but basically standard standards have not been laid down regarding the regulation of the halal concept for various existing tourist destinations, whether restaurants, saunas, spas, inns, airlines, travel agencies or other. On the other hand, there is a sense of public skepticism regarding the concept of halal tourism which is considered unable to guarantee the marginalized as well as with regard to the tools of identity politics. This study aims to find out how the halal tourism development strategy in West Nusa Tenggara Province is implemented. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. The data collection technique used was literature study and field study which included observation, interviews and documentation. The data collection technique used is through data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of this study indicate that in the process of implementing halal tourism policies in West Nusa Tenggara Province, there are several obstacles that have implications for the lack of maximum implementation of these policies. Some of these obstacles are as follows: 1) Polemic on halal tourism policies in society, 2) reduced outreach and branding activities, finally 3) natural disasters and the Covid-19 pandemic. Based on the studies undertaken in the evaluation of the West Nusa Tenggara halal tourism program, it can be concluded that the program launched has not been able to fully achieve the initial target or vision. Therefore, innovation and evaluation are needed to correct some of the weaknesses in the implementation of the West Nusa Tenggara halal tourism program in the future.

Key words; Evaluation, Development Strategy, Halal Tourism.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan cakupan kekayaan alam yang cukup melimpah. Adanya kekayaan alam yang dominan tersebut menjadi salah satu faktor penopang popularitas

Indonesia di kancah internasional. Kekayaan alam yang dimiliki cukup beragam, baik lautan maupun daratan. Indonesia dengan sejumlah kekayaan alamnya dapat dikembangkan dari sektor pariwisatanya (Prathama et al., 2020).

Pariwisata juga merupakan salah satu sektor yang dapat dimaksimalkan untuk menopang devisa negara (Anandhyta & Kinseng, 2020). Oleh sebab itulah mengapa sektor pariwisata harus dikembangkan melalui adanya perhatian lebih dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah (Wang et al., 2021). Pengembangan pariwisata daerah merupakan suatu hal fundamental yang penting untuk diupayakan. Pengembangan pariwisata daerah dimulai dari adanya *political will* kuat dari pemerintah yang diejawantahkan dalam rancangan kebijakan (Ponte et al., 2020).

Pesona alam merupakan objek wisata menarik bagi banyak kalangan, dengan adanya optimalisasi serta inovasi di sektor pariwisata tentu akan menarik minat wisatawan untuk berkunjung dan memberikan kemajuan khususnya di sektor ekonomi (Kalvet et al., 2020). Guna menopang keberhasilan pengembangan pariwisata daerah, maka diperlukan peranan ekstra dari pemerintah daerah (Almeida & Silveira, 2021). Peranan tersebut dapat ditinjau dari adanya perencanaan kebijakan yang terintegrasi dengan berbagai aspek, tidak hanya dari segi ekonomi melainkan juga dari segi budaya, lingkungan dan lain sebagainya (Kyvelou & Ierapetritis, 2020).

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan kekayaan alam yang melimpah. Menyadari hal tersebut, Pemerintah Provinsi NTB menginisiasi berbagai paket regulasi untuk menopang pengembangan pariwisata daerah yang ada. Salah satunya yang termaktub dalam Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal. Prinsip dasar wisata halal ialah yang mengedepankan pemenuhan kebutuhan dasar umat Muslim di area destinasi. Kebutuhan dasar tersebut misalnya tempat peribadatan, kesucian area wisata, makanan halal dan lain sebagainya yang sesuai dengan syariat Islam (Destiana & Sunu Astuti, 2019).

Mayoritas penduduk Indonesia khususnya Provinsi NTB yang beragama Muslim menjadi alasan kuat mengapa wisata halal memiliki

prospek dan potensi yang besar (Zaenuri et al., 2021). Selain hal tersebut, faktor fundamen adanya kebijakan wisata halal ialah untuk menunjang peningkatan pendapatan asli daerah Provinsi NTB dan juga untuk meningkatkan popularitas pariwisata NTB baik di tingkat nasional maupun internasional. Adanya kebijakan wisata halal tersebut juga pada dasarnya merupakan inovasi dari pemerintah Provinsi NTB dalam mengadopsi amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pebriana et al., 2021).

Di sisi lain, meski implementasi kebijakan pariwisata halal di Provinsi NTB baru berjalan sejak tahun 2016, namun salah satu daerah di dalamnya yakni Lombok berhasil dinobatkan sebagai peringkat pertama pariwisata halal di Indonesia dan dunia versi Global Muslim Travel Index (GMTI) pada tahun 2019 lalu. Hal tersebut merupakan hasil dari pengejawantahan upaya dan strategi oleh pemerintah Provinsi NTB dalam pengembangan pariwisata di NTB.

Namun, terdapat beberapa permasalahan dalam usaha pengembangan pariwisata halal yang terjadi selama ini. Sejauh ini, upaya pengembangan pasar wisata halal terus di masifkan di Indonesia, akan tetapi pada dasarnya belum dicanangkan standar baku terkait pengaturan konsep halal untuk berbagai destinasi wisata yang ada, baik restoran, sauna, spa, penginapan, maskapai penerbangan, biro perjalanan atau yang lainnya (Destiana & Sunu Astuti, 2019). Di sisi lain, hadir rasa skeptis masyarakat terkait konsep wisata halal yang dinilai tidak dapat menjamin kaum marginal serta berkenaan dengan alat politik identitas. Regulasi terkait wisata halal di beberapa daerah di Indonesia mendapatkan beberapa penolakan karena dinilai akan mengesampingkan kaum non-muslim, sementara dalam pengejawantahannya tidak

demikian. Hal tersebut terjadi sebab minimnya pemahaman masyarakat terkait konsep wisata halal dan juga akibat terbawa oleh adanya isu politik identitas (Makhasi & Rahimmadhi, 2020). Selain itu, persoalan pengembangan pariwisata halal di Indonesia juga dapat dilihat dari belum mampunya pemerintah daerah untuk memenuhi berbagai macam faktor pendukung wisata halal, seperti infrastruktur, ketersediaan lahan, konflik kepentingan dan lain sebagainya (Rachman, 2021).

Pengembangan pariwisata halal di Provinsi NTB tentu tidak berjalan mulus tanpa adanya kendala atau hambatan dalam pengimplementasiannya. Kendala-kendala tersebut seperti belum memadainya dasar hukum pariwisata halal secara inklusif, masih ditemui pemahaman berbeda di tengah masyarakat termasuk di kalangan *stakeholder* pariwisata di NTB, terdapat kekurangan infrastruktur penunjang wisata halal pada beberapa destinasi wisata. Temuan lainnya adalah problem SDM yang belum memadai, khususnya pramuwisata. Padahal peran dari pramuwisata (*guide*), sangat vital sebagai ujung tombak kesuksesan pengembangan pariwisata halal di NTB (Lukman Santoso, n.d.).

Adapun kebaharuan atau perbedaan dengan penelitian yang mengkaji tema terkait ialah kajian ini akan memfokuskan pada pola strategi yang dicanangkan oleh Dinas Pariwisata Provinsi NTB sebagai lokasi riset dalam mengatasi berbagai macam persoalan terkait wisata halal di NTB seperti yang diutarakan oleh beberapa penelitian terdahulu sebelumnya. Evaluasi kebijakan tersebut menggunakan pisau analisis teori dari Robert Christie Mill terkait pengembangan pariwisata. Hasil evaluasi dalam kajian ini diharapkan mampu untuk menawarkan solusi bagi pengoptimalan pengembangan pariwisata halal di NTB kedepannya dan dapat dijadikan acuan referensi bagi pengembangan wisata halal di Indonesia maupun di dunia. Mendasari kajian yang dijabarkan sebelumnya, maka adapun penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi terkait bagaimana strategi yang diinisiasi oleh

pemerintah daerah serta kendala yang dialami untuk mengembangkan pariwisata halal di Provinsi NTB dan juga untuk mengetahui berbagai macam kendala dalam upaya pengembangan pariwisata halal di Provinsi NTB.

KERANGKA PEMIKIRAN

Evaluasi merupakan usaha untuk menilai secara objektif dari pencapaian hasil-hasil yang telah direncanakan sebelumnya. Evaluasi adalah sebagai salah satu fungsi dari manajemen yang berusaha untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi hasil pelaksanaan dari sebuah rencana dan mengukur seobjektif mungkin dari hasil pelaksanaan dengan ukuran yang dapat diterima pihak yang mendukung maupun yang tidak mendukung dari suatu perencanaan.

Di sisi lain bahwa evaluasi strategi adalah proses terakhir dalam suatu kegiatan manajemen organisasi. Kegiatan evaluasi dilakukan untuk menilai dan mencermati apakah strategis yang telah dirumuskan berjalan dengan baik atau tidak. Hal seperti ini diperlukan agar bisa memenuhi prinsip bahwa strategis yang dirumuskan haruslah secara berkelanjutan atau terus menerus disesuaikan dengan perubahan-perubahan lingkungan internal maupun eksternal yang ada dilingkungan organisasi tersebut.

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini sebagaimana dikemukakan bahwa Michael Allison dan Jude Kaye mengemukakan proses evaluasi perencanaan strategis yang lebih formal sedikit, panitia perencana dapat mengevaluasi baik dokumen perencanaan maupun proses perencanaan melalui dua indikator yakni; 1) Strategi pengembangan pariwisata, dan 2) Evaluasi pengembangan pariwisata (Lukman Santoso, n.d.).

METODE

Guna mengkaji terkait strategi pengembangan pariwisata halal di Provinsi NTB, maka dibutuhkan penelitian dan analisis yang mendalam agar dapat diperoleh data yang

lebih faktual, aktual serta kontekstual mengenai hal tersebut. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun alasan penggunaan metode ini yakni permasalahan yang diangkat yakni strategi pengembangan wisata halal di Provinsi Nusa Tenggara Barat akan lebih tepat melalui deskriptif berdasarkan hasil temuan di lapangan.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yakni studi pustaka dan studi lapangan yang meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Data utama dalam kajian ini bersumber dari *stakeholder* terkait, yakni pejabat di Dinas Pariwisata Provinsi NTB, di sisi lain penulis juga menggunakan studi pustaka sebagai sumber rujukan tambahan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan untuk menjawab permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Strategi Pengembangan Pariwisata Halal NTB

Potensi sumber daya alam yang berada pada teritorial wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan suatu hal dapat menarik perhatian dunia. Kekayaan alam yang begitu melimpah mesti untuk dikelola dan dikembangkan dengan maksimal guna mendatangkan kebermanfaatan baik secara ekonomi maupun eksistensi bagi daerah NTB dan juga bangsa Indonesia secara umum. Guna tercapainya hal tersebut, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Provinsi NTB mencanangkan suatu kebijakan yang bernama "pariwisata halal". Kebijakan tersebut termaktub dalam Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal. Regulasi terkait pariwisata halal dapat dikatakan sebagai sebuah instrumen diplomasi publik Indonesia untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dan meningkatkan ekonomi daerah, karena potensi wisata halal yang besar diharapkan dapat memiliki pengaruh terhadap perekonomian daerah

terkhusus bagi Provinsi NTB sebagai destinasi wisata halal (Subarkah, 2018).

Guna mengoptimalkan visi tersebut, Pemerintah daerah khususnya Dinas Pariwisata Provinsi NTB mencanangkan beberapa metode ataupun strategi dalam upaya pengembangan pariwisata halal di Provinsi NTB. Adapun beberapa strategi yang dicanangkan tersebut ialah sebagai berikut:

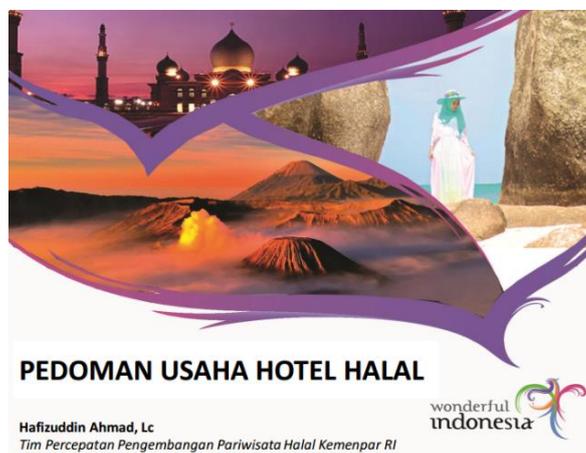
a. Sosialisasi Wisata Halal

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa pemerintah daerah khususnya Dinas Pariwisata Provinsi NTB memprakarsai pengembangan wisata halal dengan melakukan kegiatan sosialisasi secara masif dan komperhensif. Industri pariwisata tidak diperankan oleh satu atau dua elemen saja, akan tetapi dalam industri pariwisata terdapat banyak elemen atau pelaku wisata. *Travel agent*, pramuwisata, usaha penginapan, UMKM lokal, kelompok adat hingga masyarakat umum merupakan bagian terpenting dalam upaya penerapan wisata halal. Elemen-elemen tersebut merupakan aspek fundamental dalam upaya pengembangan pariwisata halal di NTB. Guna menunjang pemahaman dan pola kerja terkait kebijakan pariwisata halal di NTB, Dinas Pariwisata Provinsi NTB merumuskan berbagai formulasi sosialisasi terkait pariwisata halal yang disesuaikan dengan kelompok sasaran.

Hal paling mendasar dari direalisasikannya kebijakan terkait pariwisata halal NTB adalah dengan melihat potensi sumber daya alam dan budaya yang melekat di wilayah provinsi NTB, seiring dengan perkembangannya banyak turis asing khususnya dari negara-negara asia dan timur tengah, maka harus ada services yang baik dari segenap elemen yang ada di provinsi NTB. Oleh sebab itu, diperlukan sosialisasi terkait bagaimana usaha yang dilakukan oleh setiap elemen yang terlibat agar turis yang berkunjung bisa mendapatkan kepuasan selama berkunjung di berbagai destinasi yang ada di NTB.

Jenis materi sosialisasi disesuaikan berdasarkan kelompok elemen pelaku wisata. *Travel agent* dan pramuwisata misalkan diberikan materi tentang bagaimana membuat paket wisata halal dan materi pendampingan turis yang berkenaan dengan wisata halal. Kemudian untuk UMKM lokal diberi materi

sosialisasi terkait keramahan dan produk yang berkenaan dengan dominan kesukaan dari wisatawan muslim. Berikutnya untuk industri pariwisata di bidang penginapan diberikan sosialisasi terkait pemenuhan standarisasi halal yang kemudian akan diberikan sertifikasi halal dari Dinas Pariwisata NTB dan MUI.



Sumber: Kemenpar RI

Gambar 1. Pedoman Usaha Hotel Halal

Terkhusus untuk usaha penginapan, Dinas Pariwisata NTB bersama MUI melakukan sosialisasi lanjutan dari pedoman usaha hotel halal yang dikeluarkan oleh Kemenpar RI. Tujuannya adalah agar usaha penginapan dapat mematuhi segala standar halal yang ditetapkan berdasarkan pengkajian MUI dan Kemenpar RI. Sosialisasi standarisasi halal bagi industri penginapan merupakan suatu hal yang perlu untuk dimaksimalkan. Hal ini dikarenakan

penginapan adalah salah satu pertimbangan besar bagi wisatawan untuk berkunjung di area destinasi wisata NTB. Oleh sebab itu, standarisasi halal harus diperkuat dan direalisasikan dengan baik.

Berikut merupakan data kunjungan wisatawan baik dari wisatawan mancanegara maupun lokal di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama rentang tahun 2014-2020.

Tabel 1. Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara

No.	Bulan	Wisatwan Nusantara						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Januari	62,836	56,507	79,110	91,745	104,873	76,392	52,744
2	Pebruari	56,321	63,012	88,217	99,267	112,429	78,225	48,381
3	Maret	61,284	61,337	85,872	97,277	111,254	79,113	32,553
4	April	70,469	57,102	79,943	164,599	275,443	152,698	2,720
5	Mei	76,089	71,318	99,845	164,571	227,311	172,445	2,465
6	Juni	90,942	97,121	135,969	209,065	239,522	258,336	8,947
7	Juli	64,374	142,091	198,927	280,743	310,219	277,908	18,379
8	Agustus	98,702	192,046	268,864	269,330	18,346	284,651	29,473
9	September	78,168	251,491	352,087	244,900	50,165	167,004	27,669
10	Oktober	62,442	71,066	100,765	220,300	33,275	188,326	39,880

11	November	69,341	65,019	101,532	209,907	33,702	194,009	44,602
12	Desember	85,848	71,271	98,978	197,337	91,284	226,454	52,800
Total		876,816	1,199,381	1,690,109	2,249,041	1,607,823	2,155,561	360,613

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi NTB

Pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa terdapat fluktuatif data jumlah wisatawan dari rentang tahun 2014-2020. Jika dipahami secara detail, terdapat pelonjakkan jumlah wisatawan dari tahun 2016 hingga tahun 2017. Salah satu

faktor pelonjakkan wisatawan yang begitu drastis tersebut dipengaruhi oleh adanya daya tarik baru yang dihadirkan melalui kebijakan wisata halal oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Tabel 2. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara

No.	Bulan	Wisatawan Mancanegara						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Januari	45,715	40,927	57,298	78,209	89,234	50,877	15,120
2	Pebruari	40,774	45,912	64,278	89,217	101,756	56,451	12,294
3	Maret	43,845	43,871	61,419	86,033	97,902	62,446	9,413
4	April	53,764	72,100	100,940	109,733	181,329	103,557	70
5	Mei	66,190	77,112	107,957	134,649	192,006	124,903	145
6	Juni	84,118	93,176	130,446	171,054	199,177	155,387	138
7	Juli	65,172	196,433	271,197	194,677	206,813	181,002	302
8	Agustus	77,667	109,526	153,335	199,885	1,412	196,508	459
9	September	90,449	137,250	192,150	137,889	33,443	122,668	244
10	Oktober	57,639	70,248	90,494	128,451	25,120	132,891	610
11	November	56,733	50,279	83,866	90,452	25,110	153,663	448
12	Desember	70,240	74,312	90,948	92,396	51,254	210,438	739
Total		752,306	1,011,146	1,404,328	1,512,645	1,204,556	1,550,791	39,982

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi NTB

Berdasarkan hasil penelitian dan data yang disajikan dalam tabel 2 di atas, dapat dipahami bahwa pada tahun 2014, jumlah wisatawan mancanegara tidak sebanyak pada tahun-tahun berikutnya. Salah satu faktor yang melatarbelakangi kelonjakkan wisatawan ialah melalui adanya kebijakan wisata halal yang menarik wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke provinsi NTB, khususnya dari wisatawan Timur Tengah dan asia yang menjadi pasar utama. Akan tetapi, pada tahun 2020 dilihat ada penurunan kunjungan wisatawan mancanegara yang begitu drastis, penjabaran lebih lanjut akan diulas pada bagian berikutnya. Intinya bahwa pemerintah Provinsi NTB khususnya Dinas Pariwisata Provinsi NTB telah mampu menghadirkan sosialisasi yang cukup optimal dalam menarik

wisatawan, baik lokal maupun mancanegara untuk berkunjung dan menikmati paket maupun destinasi wisata halal yang ada di NTB.

b. Paket Wisata Halal

Dari hasil penelitian yang dilakukan maka diketahui bahwa paket wisata halal merupakan salah satu strategi yang dicanangkan oleh Dinas Pariwisata NTB guna menarik banyak wisatawan lokal maupun mancanegara untuk berkunjung ke wilayah destinasi di provinsi NTB. Paket wisata halal ini dibuat dengan mempertimbangkan dampak kebermanfaatannya bagi segala pelaku pariwisata di wilayah NTB. Paket wisata halal ini didukung oleh berbagai pemenuhan fasilitas wisata halal yang sebelumnya telah dirumuskan.



Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi NTB

Gambar 2. Contoh Paket Wisata Halal NTB

Adapun gambar di atas merupakan salah satu contoh dari paket wisata halal yang dicanangkan untuk mendongkrak wisatawan muslim berkunjung. Paket wisata halal dibuat berdasarkan kajian dan dengan memperhatikan fasilitas halal yang telah dikembangkan. Berbagai elemen pelaku wisata dilibatkan penuh dalam pembuatan maupun kebermanfaatannya dari paket wisata halal. Harapannya, dengan adanya paket wisata halal ini mampu untuk menarik wisatawan muslim dan memberikan kebermanfaatannya bagi segala pelaku wisata di Pulau Lombok dan Sumbawa.

c. Pemenuhan Fasilitas Wisata Halal

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa pemenuhan fasilitas wisata halal oleh Dinas Pariwisata Provinsi NTB bersama dengan para *stakeholder* terkait bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dari wisatawan muslim, baik lokal maupun mancanegara. Sarana dan prasarana penunjang wisata halal tersebut baik dari bandara, stasiun, pelabuhan, akomodasi/ hotel, restoran, objek, atraksi, spa, *shopping centre*, moda transportasi dan lain sebagainya. Pemenuhan fasilitas wisata halal merupakan suatu hal yang penting sebab menjadi salah satu tolak ukur capaian kebijakan pariwisata halal di Provinsi NTB. Selain itu, terdapat pemisahan tempat hiburan/ ornamen dan juga tempat minuman

keras maupun makanan non halal bagi para wisatawan. Di sisi lain, semua elemen atau pelaku dalam pariwisata halal NTB mesti memenuhi standarisasi atau SOP wisata halal yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini bertujuan untuk mengejawantahkan program wisata halal secara penuh dan menjamin kepuasan wisatawan yang berkunjung.

Di sisi lain, dari hasil observasi yang dilakukan maka ditemukan bahwa Dinas Pariwisata Provinsi NTB juga telah bekerjasama dengan pihak-pihak telekomunikasi seperti PT. Telkom untuk memperluas jangkauan jaringan telekomunikasi di berbagai destinasi pariwisata halal NTB. Hal ini dijalankan guna memberikan kenyamanan dan fasilitas yang maksimal dalam memperlancar kebijakan pariwisata halal di NTB.

d. Sertifikasi Halal

Dari hasil penelitian yang dilakukan maka ditemukan bahwa dalam rangka untuk menunjang kebijakan pariwisata halal di Provinsi NTB, maka Dinas Pariwisata Provinsi NTB bekerja sama dengan LPPOM MUI Provinsi NTB dalam upaya melakukan sertifikasi halal pada seluruh elemen penyedia makanan/ minuman. Berikut data sertifikasi halal yang dijalankan dalam kurun tahun 2012 hingga tahun 2020:

Tabel 3. Sertifikasi Halal pada Elemen Penyedia Makanan/ minuman

Tahun	Restoran (Hotel)	Restoran non Hotel & Rumah Makan	Katering	UKM	AMDK	RPH/RPU	Jumlah
2014	6			239			245
2015	1			226			227
2016	2			108			182
2017	5	75	20	75		2	175
2018	28	107	262	279	9	1	678
2019	7	52	15	347	10	3	431
2020	13	22	21	78	6		147
2021	1	6	8	15	25	6	36
2022	4	10	10	250	12	4	289
Jumlah	67	272	336	1.617	62	16	2.370

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi NTB

Berdasarkan paparan pada tabel di atas, tergambar bahwa ketika memasuki tahun 2016 atau pada tahun mulai diimplementasikannya kebijakan wisata halal NTB, terdapat kenaikan sertifikasi halal yang dilakukan Dinas Pariwisata Provinsi NTB bekerja sama dengan LPPOM MUI Provinsi NTB. Restoran dan rumah makan menjadi dominan sertifikasi selain pada produk atau point yang lainnya. Hal ini dikarenakan restoran (hotel) maupun rumah makan (non hotel) menjadi lokasi utama kedatangan turis.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masifnya sertifikasi halal pada awal-awal implementasi program ini ditunjukkan untuk memaksimalkan pengejawantahan maksud dari kebijakan pariwisata halal itu sendiri. Kemudian, dapat dilihat pasca tahun 2016-2017 terjadi fluktuatif pelaksanaan sertifikasi. Hal tersebut dikarenakan sudah banyaknya lokasi yang telah disertifikasi sebelumnya sehingga pada tahun-tahun berikutnya hanya bagi yang belum dan baru mengadakan restoran/ tempat makan di daerah Provinsi NTB.

e. *Branding* Internasional Wisata Halal NTB

Dari hasil penelitian yang dilakukan maka diketahui bahwa *branding* terkait wisata halal

Provinsi NTB tidak hanya dilakukan pada tataran nasional saja, akan tetapi dilebarkan juga pada taraf internasional. *Branding* internasional ini dilakukan pada berbagai acara atau kegiatan yang bekerjasama dengan negara-negara luar khususnya negara-negara dari timur tengah maupu Asia. *Branding* ini khususnya dilakukan dengan teknis menyebarkan dan menginformasikan kalender *event* Lombok Sumbawa pada tahun 2016 di forum-forum dunia.

Dalam upaya peningkatan dan pengembangan wisata halal di provinsi NTB, pemerintah NTB pada awal-awal kebijakan wisata halal sangat aktif melakukan kegiatan pemasaran pariwisata pada beberapa acara internasional seperti *World Halal Travel Summit* di Abu Dhabi, *ECONDE* di Malaysia, *Internationale Tourism Bourse* (ITB) di Berlin pada tahun 2016. Dalam acara tersebut ditampilkan potensi pariwisata halal di Nusa Tenggara Barat, mulai dari destinasi, budaya, dan paket perjalanan pariwisata halal. Di sisi lain juga *dibranding* terkait kalender *event*, dalam kalender *event* ini, terdapat event-event yang dikhususkan untuk menunjang adanya kebijakan wisata halal di Provinsi NTB. Berikut merupakan kalender *event* yang dimaksud:



Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi NTB

Gambar 3. Kalender Event Sebagai Salah Satu Bentuk Branding Internasional

Akan tetapi, *branding* ini tidak dijalankan secara masif dan berkala hingga hari ini, promosi ini secara masif khususnya dijalankan pada awal-awal adanya regulasi kebijakan pariwisata halal NTB. Adapun kalender *event* yang termuat di atas juga merupakan salah satu contoh yang di*branding* pada tahun 2016 lalu, sementara pada tahun-tahun berikutnya mengalami kemunduran dalam hal *branding* internasional pariwisata halal NTB.

2. Kendala Dalam Pengembangan Pariwisata Halal NTB Polemik Kebijakan Wisata Halal di Tatanan Masyarakat

Perumusan maupun implementasi kebijakan wisata halal NTB menghadirkan suatu polemik atau pertentangan yang cukup serius dikalangan masyarakat, terkhusus bagi masyarakat nonmuslim dan bagi beberapa kelompok pelaku wisata lainnya. Diksi “halal” yang digunakan mendapat multitafsiran sehingga dalam beberapa sisi dimaknai sebagai program kebijakan yang tidak bertendensi kepada masyarakat secara objektif. Label halal yang dicanangkan menjadi suatu persoalan yang dianggap kontra-produktif bagi beberapa kelompok masyarakat dan pelaku pariwisata. Meskipun mayoritas masyarakat NTB merupakan muslim, akan tetapi generalisasi program wisata halal dapat berimplikasi pada keterbatasan dan pengurangan ruang lingkup bisnis dan usaha bagi beberapa pelaku maupun

kelompok masyarakat dalam industri pariwisata di NTB.

Pluralitas suku yang ada di provinsi NTB juga menjadi suatu persoalan karena dapat menghadirkan konflik sosial sebab diimplementasikannya kebijakan pariwisata halal. Paradigma konsep halal bagi beberapa kelompok masyarakat diadopsi sebagai suatu gaya hidup baru dengan konsep religius. Stigma wisata halal ini dimaknai secara bebas sehingga terkadang menimbulkan polemik atau konflik sosial baik antar sesama masyarakat, pelaku wisata maupun pemerintah selaku pembuat regulasi. Persoalan ini juga menjadi suatu polemik serius sebab terdapat beberapa kelompok maupun oknum yang menggiring kebijakan ini sebagai suatu kebijakan politis guna menjatuhkan citra dari pemerintah yang sedang menjabat. Keadaan pada awal-awal implementasi dan perencanaan kebijakan wisata halal di NTB semakin cukup berpolemik disebabkan adanya isu-isu dan penggiringan politik terhadap kebijakan yang dicanangkan oleh pemerintah.

Meskipun pada awal perencanaan maupun implementasi kebijakan wisata halal cukup menimbulkan polemik di kalangan masyarakat, akan tetapi lambat laun dalam pengimplementasiannya sudah dapat diatasi dan dinormalisasi. Hal tersebut dilakukan dengan pola komunikasi baik yang dibangun dan penyampaian maksud utama dari kebijakan ini yakni bertujuan untuk

pengenalan pariwisata Indonesia khususnya NTB serta guna pertumbuhan ekonomi yang baik dan akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat khususnya bagi para pelaku yang bergerak di industri pariwisata itu sendiri.

a. Berkurangnya Kegiatan Sosialisasi dan *Branding*

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi dan *branding* pariwisata halal provinsi NTB tidak semasif pada awal-awal ketika program baru dirumuskan dan diimplementasikan. Terdapat beberapa penyebab mengapa kegiatan ini tidak dijalankan dengan masif dan berkala. Beberapa penyebab utama ialah dikarenakan kegiatan sosialisasi dan *branding* cukup dijalankan atau digencarkan di awal guna menyapaikan pemberitahuan dan pelatihan kepada masyarakat maupun turis terhadap kebijakan wisata halal yang dicanangkan. Kemudian, persoalan dana dan adanya program wisata lain di daerah NTB menjadi suatu pembagi fokus pemerintah dalam melakukan dan terus maksimal menjalankan program wisata halal. Di sisi lain, tujuan dari sosialisasi juga pada awalnya hanya sebatas memberikan pemahaman pada masyarakat dan juga para pelaku usaha terkait teknis dan administrasi program kebijakan wisata halal. Pemerintah kembali tidak gencar melakukan sosialisasi dikarenakan asumsi yang dicanangkan telah mampu dipahami dengan baik oleh masyarakat maupun para pelaku usaha di provinsi NTB.

Meskipun demikian namun dengan berkurangnya sosialisasi dan *branding* ini dinilai berimplikasi pada berkurangnya pengunjung di daerah wisata NTB. Hal tersebut dapat terlihat pada tabel pengunjung atau wisatawan yang telah dipaparkan sebelumnya. Meskipun tidak menjadi penyebab utama, akan tetapi persoalan ini menjadi suatu penentu dalam menarik wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Adapun persoalan utama dari banyaknya penurunan angka atau jumlah wisatawan di provinsi NTB ialah dikarenakan persoalan bencana alam dan pandemi Covid-19.

b. Bencana Alam dan Pandemi Covid-19

Berdasarkan penelitian di lapangan maka diketahui bahwa bencana alam khususnya gempa yang begitu kuat mengguncang wilayah Lombok dan sekitarnya berdampak begitu serius bagi sektor perekonomian dan kepariwisataan di daerah NTB. Gempa yang mengguncang Pulau Lombok pada tahun 2018 tersebut merubuhkan berbagai macam infrastruktur penunjang pariwisata yang sebelumnya telah diadakan oleh pemerintah provinsi NTB. Gempa tersebut terjadi pada Agustus 2018 dengan dengan kekuatan 7,0 skala Richter. Gempa tersebut menewaskan ratusan orang dan juga berdampak pada ribuan bangunan yang mengalami kerusakan parah. Pasca terjadi gempa, imbas pada bidang pariwisata begitu besar. Kebijakan pariwisata halal yang baru 2 tahun dijalankan juga dalam hal ini terdampak. Turis-turis lokal maupun asing menjadi cemas dan khawatir untuk berwisata ke daerah NTB khususnya Pulau Lombok. Pada situasi ini, sektor pariwisata menjadi sangat terpuruk untuk sementara, hal tersebut dikarenakan banyaknya infrastruktur pariwisata yang rusak. Hal ini juga menjadi pertimbangan wisatawan untuk berkunjung ke berbagai daerah wisata di provinsi NTB.

Di sisi lain, hasil observasi menunjukkan bahwa pada akhir tahun 2019 dan puncaknya mulai April tahun 2020, Indonesia khususnya NTB dijajaki wabah pandemi Covid-19. Berbagai kebijakan pembatasan aktivitas sosial dari pemerintah pusat maupun daerah mau tidak mau dipatuhi agar wabah tidak menjalar secara serius. Pembatasan bagi wisatawan asing juga diterapkan, alhasil sangat minim wisatawan datang untuk berkunjung ke NTB. Irma Agriyanti S.S menggambarkan program wisata halal seperti “sudah jatuh, lalu tertimpa tangga” akibat dari gempa pada tahun 2018 dan pandemi Covid-19 yang mulai berimbas pada awal tahun 2020. Dampak dari pandemi bagi sektor pariwisata NTB begitu besar dirasakan, bahkan dampak tersebut masih terasa hingga akhir tahun 2022 dewasa ini.

Pertumbuhan ekonomi yang diharapkan melalui berbagai program kebijakan pariwisata seperti pariwisata halal menjadi sangat terhambat akibat gempa dan pandemi. Kebijakan yang diharapkan mampu memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat NTB tersebut hingga kini belum sepenuhnya mampu untuk memenuhi target dasar yang diharapkan. Intinya bahwa, persoalan fundamen dalam implementasi program pariwisata halal NTB disebabkan oleh bencana alam gempa pada tahun 2018 lalu dan pandemi Covid-19. Terkait kendala lain, Irma Agriyanti S.S mengungkap tidak begitu besar sekiranya mampu untuk diatasi dan dinormalisasi.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan analisa di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan pariwisata halal NTB yang secara legal termaktub dalam Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal merupakan suatu kebijakan pariwisata dengan tujuan memberikan banyak kebermanfaatn bagi seluruh elemen masyarakat NTB. Dalam perencanaan maupun implementasi kebijakan ini, sebelumnya telah diadakan upaya atau strategi dengan tujuan agar program wisata halal NTB dapat berjalan secara maksimal dan sesuai visi yang diharapkan. Adapun beberapa upaya/ strategi tersebut ialah sebagai berikut: 1) Sosialisasi wisata halal, 2) paket wisata halal, 3) pemenuhan fasilitas penunjang wisata halal, 4) sertifikasi halal dan 5) *branding* internasional terkait pariwisata halal NTB.

DAFTAR PUSTAKA

- Almeida, I., & Silveira, L. (2021). Collaborative Tourism Planning in Small Municipalities. The Creation of a Local Development Strategy for Pombal (Portugal) Through the Application of the Delphi Technique . *Revista Portuguesa de Estudos Regionais*, 57, 57–69.
- Anandhyta, A. R., & Kinseng, R. A. (2020).

Namun dalam implementasi kebijakan wisata halal di NTB, terdapat beberapa kendala yang berimplikasi pada kurang maksimalnya penerapan kebijakan tersebut yang meliputi: 1) Polemik kebijakan wisata halal di tatanan masyarakat, 2) berkurangnya kegiatan sosialisasi dan *branding*, terakhir 3) bencana alam dan pandemi Covid-19. Bencana alam dan pandemi Covid-19 merupakan kendala fundamen dalam upaya pengembangan program pariwisata halal di provinsi NTB. Dalam evaluasi program wisata halal NTB, maka dapat disimpulkan bahwa program yang dicanangkan tersebut belum mampu untuk secara penuh mencapai target atau visi awal. Oleh sebab itu, diperlukan adanya inovasi dan evaluasi untuk memperbaiki beberapa kelemahan dalam implementasi program pariwisata halal NTB kedepannya.

Pemerintah Provinsi NTB khususnya Dinas Pariwisata perlu untuk melaksanakan evaluasi guna menghadirkan solusi alternatif mengenai persoalan yang ada. Pembangunan fasilitas penunjang yang hancur disebabkan bencana alam mesti untuk dimasifkan kembali, Di sisi lain, pemulihan sektor pariwisata melalui pengendalian pandemi dan *branding* wisata halal mesti kembali digencarkan. Ajakan seluruh elemen pelaku wisata juga dalam hal ini mesti untuk diupayakan. Melalui berbagai upaya tersebut, penulis meyakini dapat memperbaiki dan menumbuhkan kembali marwah dari program pariwisata halal oleh Dinas Pariwisata NTB untuk ke depannya.

- Hubungan Tingkat Partisipasi dengan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat dalam Pengembangan Wisata Pesisir. *Jurnal Nasional Pariwisata*, 12(2), 68. <https://doi.org/10.22146/jnp.60398>
- Destiana, R., & Sunu Astuti, R. (2019). Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia. *Collaborative Governance dalam Pengembangan Pariwisata di Indonesia*, 01(01), 331–353.

- Kalvet, T., Olesk, M., Tiits, M., & Raun, J. (2020). Innovative tools for tourism and cultural tourism impact assessment. *Sustainability (Switzerland)*, 12(18). <https://doi.org/10.3390/SU12187470>
- Kyvelou, S. S. I., & Ierapetritis, D. G. (2020). Fisheries sustainability through soft multi-use maritime spatial planning and local development co-management: Potentials and challenges in Greece. *Sustainability (Switzerland)*, 12(5). <https://doi.org/10.3390/su12052026>
- Lukman Santoso, Y. T. C. dan S. (2020). Dilema Kebijakan Halal di Pulau Lombok. *Jurnal Khazanah*, 15(1), 23–44.
- Makhasi, G. Y. M., & Rahimadhi, M. T. Y. (2020). Ramai-Ramai Menolak Wisata Halal: Kontestasi Politik Identitas dalam Perkembangan Wisata Halal di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 14(2), 373. <https://doi.org/10.14421/jsr.v14i2.1767>
- Pebriana, F., Mulyawan, R., & Sutrisno, B. (2021). *Strategi pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata untuk meningkatkan pendapatan asli daerah*. 1(April), 11–22.
- Ponte, J. C., Couto, G., Pimentel, P., Sousa, Á., & Oliveira, A. (2020). Municipal Tourism Planning in an Island Territory: The Case of Ribeira Grande in the Azores. *Tourism Planning and Development*. <https://doi.org/10.1080/21568316.2020.1816567>
- Prathama, A., Nuraini, R. E., & Firdaus, Y. (2020). Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Dalam Prespektif Lingkungan (Studi Kasus Wisata Alam Waduk Gondang Di Kabupaten Lamongan). *Jurnal Sosial, Ekonomi dan Politik*, 1(3), 29–38.
- Rachman, A. (2021). *Strategi Pengembangan Pariwisata Halal Dalam Meningkatkan Daya Saing Bisnis Pariwisata Indonesia*. 2(4), 1–17.
- Subarkah, A. R. (2018). Potensi dan Prospek Wisata Halal Dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah (Studi Kasus: Nusa Tenggara Barat). *Jurnal Sosial Politik*, 4(2), 49. <https://doi.org/10.22219/sospol.v4i2.5979>
- Wang, W., Feng, L., Zheng, T., & Liu, Y. (2021). The sustainability of ecotourism stakeholders in ecologically fragile areas: Implications for cleaner production. *Journal of Cleaner Production*, 4(2), 279–293. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.12366>
- Zaenuri, M., Hasan, Y. A., Wahyuningsih, S. H., Atmojo, M. E., & Iqbal, M. (2021). *Halal Tourism Concepts and Policies: Case in West Nusa Tenggara*. 3(6), 18–25. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210120.100>



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license